

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Basis utama dari Iran adalah menggunakan mazhab Syiah, karena Iran dalam sejarahnya tidak lepas dari pengaruh dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi dikenal sangat berperan besar terhadap penyebaran dan menghidupkan paham Syiah.¹ Tidak heran jika Iran disebut sebagai negara yang menganut paham syiah terbesar karena pengaruh dari paham syiah masuk sampai ke struktur sosial dan kehidupan masyarakat di Iran. Eksistensi syiah Iran semakin terpancar setelah terjadinya revolusi Islam 1979, karena diberlakukannya hukum Islam di negara tersebut.

Republik Islam Iran merupakan negara yang berkomitmen menjalankan syari'at Islam dan demokrasi dalam sistem politik pemerintahannya. Komitmen tersebut diawali oleh terjadinya revolusi Islam Iran yang telah mempengaruhi nilai-nilai identitas nasional, sosial, politik, hingga budaya yang menunjukkan bagaimana hubungan Islam dan politik itu diwujudkan. Revolusi tersebut dipimpin oleh Ayatullah Khomeini sebagai bentuk penolakan secara besar-besaran terhadap pemerintahan Syah Reza Pahlevi. Penolakan terjadi dikarenakan pemerintahan Reza Pahlevi dikenal memiliki ketergantungan besar kepada barat. Pahlevi pada kekuasaannya saat itu ingin menjadikan Iran selayaknya negara-negara modern di

¹ Nabilah Wafa W. & Roma Ulinnuha. (2022). *Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab pada Era Hassan Rouhani*. Musawa, 21(2), 171–186.

barat. Para Ulama berpendapat bahwa adanya modernisasi yang berlangsung, telah mencemarkan ajaran Islam dan membatasi hak-hak mereka. Munculnya ketimpangan sosial dan budaya asli yang sudah digantikan oleh budaya Barat menjadikan Iran pada pemerintahan Pahlevi sudah jauh dari identitas Iran yang sebenarnya. Melalui revolusi yang terjadi pada tahun 1979 tersebut, Iran secara resmi mengalami transisi menjadi Republik Islam sekaligus menjadi akhir dari kekuasaan syah Reza Pahlevi.²

Selain itu sebelum menjadi negara Republik, Iran merupakan negara dengan sistem kedaulatan monarki yang sudah berlangsung selama 25 abad. Revolusi Islam Iran 1979 berhasil menumbangkan bentuk monarki tersebut melalui kekuatan para *Mullah* (ulama). Sistem yang diberlakukan di Iran pasca revolusi adalah sistem pemerintahan *Waliyat Al-Faqih* yang merupakan bentuk ijtihad politik Ayatullah Khomeini, yaitu artinya kepemimpinan dipegang oleh para *mullah*, hal ini menekankan jika keputusan yang diambil oleh ulama hukumnya menjadi mutlak.³

Perempuan Iran diakui memiliki kontribusi besar terhadap sukseksi Revolusi Islam yang terjadi. Khomeini memandang jika perempuan memiliki derajat yang sama terkait hak-hak dengan laki-laki. Seperti halnya hak untuk bekerja, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk terlibat dalam politik, hak memilih ataupun dipilih.⁴ Namun karena pada dasarnya budaya patriarki sudah mendarah daging pada pundi-pundi kehidupan Iran, meskipun terdapat perempuan yang

² Chaerul Mundzir. 2020. *Dimensi Islam dan Politik: Telaah Historis atas Revolusi Iran 1979*. Jurnal al-Hikmah Vol. 22 No. 2.

³ Wijayanto. *Op. Cit.*

⁴ Kiki Mikail. (2015). POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. *Addin*, 9(2), 253–276. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>

berpendidikan tinggi dan dapat menghasilkan uangnya sendiri, tetap hanya laki-laki yang bisa memiliki posisi tinggi dalam kedudukan-kedudukan penting.⁵ Seiring berjalannya waktu, ruang bagi perempuan mengalami perubahan pasca revolusi Islam. Banyak aturan yang mengandung diskriminasi pada perempuan, dan mengandung hukum bias gender.⁶

Aturan-aturan yang dibuat pasca revolusi Islam selain mengandung diskriminasi juga bersifat koersif, intimidatif bagi perempuan. Posisi laki-laki lebih diuntungkan dibanding perempuan dalam setiap kebijakan. Hal ini dikarenakan para ulama didominasi oleh laki-laki dan konsep Imamah yang dianut Iran memberikan kekuasaan bagi para ulama untuk menafsirkan Al-Quran. Penafsiran tersebut tentu saja didasari dari pengalaman mereka sebagai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut posisi perempuan mengalami pergeseran dan menjadikannya sebagai warga kelas dua.⁷

Terdapat batasan-batasan ruang gerak bagi perempuan, salah satunya karena terjadi pemisahan di ruang publik bagi perempuan dan laki-laki. Pemisahan tersebut terjadi seperti di sekolah, universitas, kantor, tempat olahraga, dan tempat-tempat publik lainnya.⁸ Khomeini juga mengeluarkan aturan kewajiban memakai hijab bagi semua perempuan Iran. Hijab yang harus digunakan oleh perempuan Iran adalah hijab yang menutupi anggota tubuh perempuan dan hanya diperbolehkan

⁵ Falka Haidar. (2020). *PENGARUH FEMINISME BARAT PADA GERAKAN KESETARAAN GENDER DI REPUBLIK ISLAM IRAN* [FISIP UMY].
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32585>

⁶ Falka Haidar, *Ibid.*

⁷ Falka Haidar, *Ibid.*

⁸ Samsi Azizah & M. Zahrul Anam. (2020). *Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menentang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005*.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495080&val=23800&title=Advokasi>

untuk memperlihatkan bagian wajah dan telapak tangan saja.⁹ Aturan kewajiban memakai hijab tersebut tidak hanya diberlakukan pada perempuan muslim, namun juga diberlakukan pada perempuan non-muslim Iran. Hal tersebut tentu mengundang protes dari pihak perempuan non-muslim.¹⁰ Mereka yang tidak mematuhi aturan kewajiban berhijab ini akan dikenakan hukuman berupa 74 kali cambukan berdasarkan keputusan parlemen Iran pada tahun 1983. Beberapa tahun kemudian sanksi yang diberikan bisa juga berupa penjara selama 2 bulan.¹¹ Dalam hal bepergian perempuan dilarang untuk pergi ataupun keluar rumah tanpa adanya muhrim. Perempuan Iran juga diminta untuk menunjukkan bukti jika laki-laki yang keluar bersama mereka adalah muhrimnya, jika tidak konsekuensi yang akan diterima mereka akan dijatuhi sanksi dari pengadilan. Pemerintah sangat jelas bermaksud untuk mengurangi kehadiran perempuan pada ruang publik. Organisasi perempuan yang bergerak di masa itu dipaksa untuk berhenti, selain itu terjadi pemecatan perempuan dari berbagai lapangan pekerjaan dan beberapa profesi pekerjaan juga dilarang bagi perempuan.¹²

Iran memiliki pasukan penegakan hukum yang dikenal dengan sebutan Polisi moral atau *Guidance Patrol* yang memiliki tugas untuk melakukan patrol dan memastikan bahwa masyarakat Iran mematuhi aturan berpakaian, juga aturan

⁹ Wijayanto. *Op. Cit.*

¹⁰ Anis Shofiah. (2019). *DINAMIKA GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN IRAN (PRA & PASCA REVOLUSI 1979)*.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nUdU_lAXpIAJ:digilib.uinsby.ac.id/31684/1/Anis%2520Shofiyah_A92215029.pdf&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=id

¹¹ Kersten Knipp. (2020, December 22). *Mengapa Otoritas Iran Paksa Perempuan Berkerudung?* DW. <https://www.dw.com/id/mengapa-otoritas-iran-paksa-perempuan-berkerudung/a-56017453>

¹² Valentine M. Moghadam. (2022). *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate*. *Journal of Woman in Culture and Society*, 27(4). https://tavaana.org/nu_upload/L1_-_Islamic_feminism.pdf

terkait ketidak sopanan, dan kejahatan sosial yang dibuat.¹³ Polisi moral juga memiliki wewenang dalam menggunakan senjata dan penahanan untuk ditujukan kepada masyarakat Iran yang melanggar peraturan, salah satunya peraturan berpakaian sesuai aturan yang ditentukan Iran. Namun dalam praktiknya polisi moral dianggap keras dan kasar. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat Iran melakukan perlawanan sebab kehadiran polisi moral merupakan momok bagi mereka.

Terkait aturan kewajiban berhijab yang diberlakukan di Iran, seorang perempuan yaitu Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moral hingga berujung kematian. Penangkapan tersebut dikarenakan hijab yang digunakan oleh Mahsa Amini tidak sesuai syariat yang ditentukan. Namun beberapa saat setelah penangkapannya, Mahsa Amini dinyatakan koma lalu meninggal dunia. Polisi Teheran menyatakan jika kematian Mahsa Amini disebabkan karena serangan jantung saat dirinya sedang ditahan. Informasi yang lainnya menyatakan jika kondisi Mahsa Amini memang sedang tidak sehat sebelum penangkapan terjadi. Namun informasi yang beredar tersebut direspon oleh keluarganya bahwa Mahsa Amini tidak mengidap penyakit apapun dan luka yang didapati pada tubuh Mahsa Amini merupakan bentuk dari kekerasan polisi moral yang dilakukan selama penangkapan.¹⁴

¹³ CNN Indonesia. (2022, September 23). *Apa Itu Polisi Moral Iran yang Tangkap Mahsa Amini*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220923162709-120-851867/apa-itu-polisi-moral-iran-yang-tangkap-mahsa-amini/1>

¹⁴ CNN Indonesia. (2022, September 20). *Iran Rusuh sampai Pedemo Tewas Gegara Kematian Mahsa Amini*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220920105911-120-850164/iran-rusuh-sampai-pedemo-tewas-gegara-kematian-mahsa-amini>

Terbunuhnya Mahsa Amini mengundang banyak perhatian masyarakat domestik Iran hingga Internasional. Respon atas kejadian tersebut mengundang kemarahan yang ditunjukkan kepada pemerintah yaitu terjadi demonstrasi yang menyebar di Iran sebagai bentuk protes atas undang-undang kewajiban berhijab. banyak perempuan turun ke jalan sambil melepas hingga membakar hijab mereka sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang tersebut. banyak masyarakat yang bersatu untuk menyuarakan hak perempuan atas kebebasan dalam memilih cara berpakaian.

Gerakan protes dilakukan sebagai respon atas kematian Mahsa Amini, dimana gerakan tersebut dikenal dengan gerakan *Woman Life Freedom* (kebebasan hidup perempuan). Peristiwa kematian Mahsa Amini menjadi awal momentum dari masifnya gerakan *Woman Life Freedom*, bahkan gerakan ini menjadikan sosok Mahsa Amini sebagai tokoh berpengaruh yaitu menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Selain itu dan peristiwa ini menyoroti isu terkait Hak Asasi Manusia. Ungkapan *Woman Life Freedom* diartikan sebagai keinginan dan komitmen terkait kesetaraan, keamanan, serta hak memilih dalam hal berpakaian dan kehidupan bagi perempuan.¹⁵ Beberapa konteks yang telah dipaparkan sebelumnya menarik bagi penulis, dimana hal tersebut yang menjadi urgensi dalam penelitian ini. Gerakan *Woman Life Freedom* merebak ke seluruh bagian dunia yaitu dengan memiliki satu tujuan yang sama yaitu bermaksud untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan perempuan yang direbut atau dibatasi, dan

¹⁵ Sabrina Talbert. 2022. 'Woman, Life, Freedom': What The Rallying Cry For Iranian Woman Means And The 15,000 Protesters, Explained. Woman's Health.
<https://www.Womanshealthmag.com/life/a41957175/Woman-life-freedom-iran-protest/>

juga berjuang untuk hak kendali atas diri mereka sendiri. Melalui gerakan *Woman Life Freedom* terdapat pesan yang disampaikan terkait pentingnya perempuan dalam kehidupan baik dalam struktur masyarakat, keluarga, dan juga dalam kepemimpinan politik.¹⁶

Gambaran di atas menunjukkan bahwa para perempuan Iran menyuarakan penolakan mereka terhadap aturan-aturan yang selama ini bersifat mengekang ruang gerak bagi mereka. Budaya patriarki yang sangat kental pada masyarakat Iran berpengaruh sampai kepada para *mullah* dalam merumuskan aturan-aturan di Iran. Salah satu kebijakan yang sangat ditentang adalah kewajiban berhijab yang sifatnya memaksa bagi semua perempuan Iran. Karena adanya aturan tersebut muncul gerakan-gerakan untuk menuntut keadilan akan kebebasan perempuan dengan salah satu bentuk penolakannya adalah dengan tidak memakai hijab sesuai aturan, yang dimana aksi penolakan tersebut memakan nyawa salah seorang warga Iran yaitu Mahsa Amini sehingga kasusnya menjadi sorotan di Iran hingga masyarakat Internasional. Dengan ini penelitian ini akan membantu dalam memahami bagaimana strategi gerakan *Woman Life Freedom* dalam memperjuangkan keadilan aturan hijab Iran setelah kematian Mahsa Amini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka bisa diketahui jika gerakan feminisme yang muncul di Iran merupakan

¹⁶ Homa Bazafkan. 2020. "*Woman, Life, Freedom*" a new revolutionary era in Iran. Vienna Institute for International Dialogur and Cooperation. <https://www.vidc.org/en/detail/Woman-life-freedom-a-new-revolutionary-era-in-iran>

tindakan para masyarakat Iran sebagai bentuk perjuangan atas hak-hak mereka. Dan gerakan tersebut salah satunya muncul setelah peristiwa kematian Mahsa Amini. Maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, "Bagaimana strategi yang dilakukan oleh gerakan *Woman Life Freedom* dalam memperjuangkan keadilan aturan hijab Iran setelah kematian Mahsa Amini?"

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan, penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi yang dilakukan gerakan *Woman Life Freedom* dalam memperjuangkan keadilan aturan wajib hijab Iran setelah peristiwa kematian Mahsa Amini.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti Hubungan Internasional lainnya yang memiliki keterkaitan dalam judul dan konsep yang diteliti. Selain itu penulis juga berharap jika tulisan ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi atau literatur mengenai strategi perjuangan gerakan *Woman Life Freedom* di Iran pasca peristiwa kematian Mahsa Amini.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada individu, kelompok, maupun penulis sendiri dalam memahami lebih dalam mengenai topik yang diteliti. Sehingga para pembaca memahami strategi perjuangan gerakan *Woman Life Freedom* di Iran setelah kematian seorang perempuan bernama Mahsa Amini.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama ditulis oleh Iccha Anjelita Sijabat dan Muhammad Yusuf Abror yang berjudul “**Upaya *Woman Life Freedom* Dalam Menegakkan Kebebasan Perempuan Di Iran (Studi Kasus Kematian Mahsa Amini)**”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan konsep gerakan sosial dengan 3 strategi utama dalam menjelaskan upaya yaitu tuntutan, ruang lingkup, dan taktik. Penelitian ini membahas tentang upaya gerakan *Woman Life Freedom* dalam menegakkan kebebasan bagi perempuan Iran.

Upaya oleh gerakan dilakukan melalui petisi, aksi demonstrasi, dan sosial media. Gerakan ini menggunakan taktik seperti memotong rambut ditempat umum saat protes berlangsung. Gerakan ini aktif menggunakan media sosial dan tagar *#womanlifefreedom* untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dunia. Meskipun belum terlihat adanya perubahan signifikan, gerakan ini terus berlanjut dan berhasil mendapat perhatian masyarakat internasional

¹⁷ Iccha Anjelita Sijabat and Muhammad Yusuf Abror. (2023). *UPAYA WOMAN LIFE FREEDOM DALAM MENEGAKKAN KEBEBASAN PEREMPUAN DI IRAN (STUDI KASUS KEMATIAN MAHSA AMINI)*. Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/105546/>.

terhadap peristiwa yang terjadi di Iran. Meskipun terjadinya perubahan sosial memerlukan waktu cukup lama, namun gerakan ini terus berjuang untuk mencapai tujuan mereka dalam menegakkan kebebasan perempuan di Iran.

Penelitian kedua ditulis oleh Renny Ayu Puspitasari, Pramesty Putri Ridzky Hutami, dkk, dengan mengangkat judul “*Juridical Study of the Death of Mahsa Amini Based on Islamic Law and International Human Rights*”.¹⁸ Penulis artikel ini menggunakan jenis penelitian studi literatur yaitu dengan menelusuri sumber-sumber yang telah ada untuk menjelaskan penelitian. Penulis bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia melalui kasus kematian Mahsa Amini. Penulis menggambarkan bagaimana hukum Islam menempatkan pentingnya kehidupan manusia dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan atau pembunuhan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam situasi yang sangat ekstrem seperti dalam keadaan perang. Hukum Islam juga mengatur hak-hak perempuan dan mendorong perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Penulis mengamati bahwa hak-hak perempuan telah dilanggar oleh aparat keamanan Iran. Kematian Mahsa Amini menjadi bukti dilakukannya pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas di Iran, khususnya terhadap perempuan. Para penulis mengamati bahwa respons dari pemerintah Iran sangat minim dan tidak adanya upaya untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian Mahsa Amini. Sementara itu, banyak organisasi hak asasi manusia internasional telah

¹⁸ Renny A. Puspitasari, Pramesty. P. R. Hutami, Mira. D. Prasyanti, dkk. (2022). *Juridical Study of the Death of Mahsa Amini Based on Islamic Law and International Human Rights*. *Sinomics*, 1(5), 607–612.

mengeluarkan pernyataan yang mengecam kasus ini dan menyerukan perlindungan hak asasi manusia di Iran. Negara Iran harus diingatkan akan pentingnya melindungi hak asasi manusia dan memberikan hukum yang adil bagi semua orang.

Penelitian ketiga ditulis oleh Azam Khatam, dengan judul **”Mahsa Amini’s Killing, State Violence, and Moral Policing in Iran”**. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi budaya gerakan serta tantangan-tantangan dalam mencapai tujuan politik. Penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan dari empat aspek penting seperti radikalisasi politik akibat dari meningkatnya kekerasan negara, meningkatnya jumlah penentang aturan hijab, kontribusi pemuda dalam protes untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan kemarahan masyarakat anti-pemerintah dalam menuntut kebebasan.

Penelitian ini membahas gerakan protes anti-pemerintah di Iran setelah kematian Mahsa Amini yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat yaitu kaum muda, perempuan, dan komunitas etnis, menunjukkan solidaritas dan ikatan kolektif yang kuat dalam menentang kebijakan pemerintah yang otoriter. Meskipun protes ini mendapat simpati publik yang luas, rezim Iran tetap merespon dengan kekerasan dalam menindak protes tersebut. Gerakan protes ini menunjukkan ketahanan dan keberanian masyarakat dalam menghadapi tekanan pemerintah yang keras.

Penelitian keempat ditulis oleh oleh Moh. Choirul Anam dengan mengangkat judul **“Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam**

Perspektif Shirin Ebadi”.¹⁹ Dalam penelitian ini, Choirul Anam menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan gender dan pendekatan HAM melalui pandangan Shirin Ebadi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan jika peran yang didapat oleh perempuan Iran sulit untuk memperoleh akses setara dengan laki-laki pasca revolusi 1979 baik dari bidang pendidikan, sosial-politik, ekonomi dikarenakan struktur patriarki yang sangat kental di Iran. Menurut Shirin Ebadi dalam penelitian Choirul Anam, perempuan Iran telah dibatasi perannya oleh pemerintah Iran di banyak aspek kehidupan. Dikarenakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bias gender yang dimana menyebabkan keterbatasan bagi perempuan.

Choirul Anam menegaskan bahwa perlindungan hak asasi perempuan hal yang sangat penting dan perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Dimana hak asasi yang dimiliki oleh perempuan sama seperti hak asasi yang dimiliki oleh laki-laki. Menurutnya Iran perlu adanya perubahan dalam pandangan masyarakat dan pemerintah mengenai kebijakan penggunaan hijab. Perempuan harus diberikan kebebasan untuk memilih cara berpakaian mereka dan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, peran perempuan harus diakui dan dihargai secara adil dan seimbang dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Penelitian kelima ditulis oleh Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam dengan mengangkat judul **“Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menentang**

¹⁹ Moh Choirul Anam. (2022). *PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI*. Pascasarjana (UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022). 33(1), 1–12.

Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005”.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan landasan teori advokasi. Berdasarkan hal tersebut ditemukan jika Iran pasca revolusi 1979, kebijakan yang ditegakkan cenderung mendiskriminasi perempuan. Bahkan diskriminasi terhadap perempuan di Iran telah berhasil menciptakan perpecahan di antara masyarakat Iran sehingga mereka menentukan terpecah mencari jalan mereka sendiri dikarenakan kesadaran subordinasi yang terjadi.

Berdasarkan teori advokasi yang dipakai oleh penulis, perjuangan perempuan Iran dilakukan dengan memberikan dukungan satu sama lain, terutama dalam konteks pendidikan, di mana mereka melakukan upaya peningkatan literasi di lingkungan pedesaan dan memberikan penyuluhan tentang kesadaran bergender. Hal ini menjadi penguat serta latar belakang bagi para feminis yang akhirnya berhasil membentuk massa dalam gerakan perempuan di Iran. Hal lainnya yang dilakukan oleh para feminis dalam penelitian ini adalah melakukan pembangunan massa yang mampu menghasilkan kumpulan karya ilmiah yang dapat menjadi bahan pertukaran informasi tentang isu-isu perempuan di Iran. Selain itu, para feminis juga melakukan kontribusi pada garis terdepan dalam upaya melaksanakan lobby untuk keterlibatan perempuan dalam proses legalisasi.

Penelitian keenam ditulis oleh Nabilah Wafa Wijayanto dan Roma Ulinuha dengan mengangkat judul **“Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan**

²⁰ Azizah Samsi Azizah & M. Zahrul Anam. (2020). Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menentang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495080&val=23800&title=Advokasi>

Wajib Berhijab Pada Era Hassan Rouhani”.²¹ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh perempuan Iran terhadap kebijakan wajib hijab yang diberlakukan oleh otoritas Iran setelah terjadinya revolusi Islam 1979. Dimana penelitian ini juga berfokus pada kebijakan wajib hijab di masa kepemimpinan Hassan Rouhani yang tidak mengalami perubahan dan masih tetap diberlakukannya kontrol pakaian. Namun hukum penggunaan hijab sedikit lunak dan aturan syariah mulai dikendurkan. Oleh karena hal ini pada masa pemerintahannya menjadi puncak akan gerakan-gerakan penolakan terhadap kebijakan wajib berhijab.

Penelitian ini menggunakan perspektif dari tokoh Feminisme Fatima Mernissi yaitu seorang feminis muslim yang mengkritik sistem patriarki dan memandang hijab sebagai simbol diskriminasi bagi perempuan. Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan sejarah kebijakan terkait hijab di Iran sejak era kekuasaan Shah Pahlevi hingga setelah terjadinya revolusi Islam terutama pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani. Mernissi menganggap bahwa hijab tidak wajib hukumnya, namun penggunaan hijab perlu karena sejatinya hijab ditujukan untuk melindungi perempuan dari kejahatan laki-laki.

Dalam konteks penelitian utama penulis dengan penelitian pertama, kedua, dan ketiga, terdapat persamaan dengan penelitian utama penulis yaitu terletak pada studi kasusnya yaitu membahas terkait gejolak yang terjadi setelah peristiwa kematian Mahsa Amini. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian pertama

²¹ Nabilah Wafa W. & Roma Ulinuha. (2022). *Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab pada Era Hassan Rouhani*. *Musawa*, 21(2), 171–186.

dengan penelitian utama penulis, dimana penelitian ini berfokus pada strategi gerakan *Woman Life Freedom* dengan menggunakan strategi *recruitment* dalam menjelaskan penelitian. Penelitian kedua dan ketiga hanya menjelaskan secara umum terjadinya protes masyarakat terhadap pihak berwenang setelah kematian Mahsa Amini.

Sementara adapun juga persamaan dari penelitian keempat, kelima, dan keenam dengan penelitian utama penulis adalah sama-sama membahas terkait diskriminasi yang diterima oleh perempuan Iran pasca terjadinya revolusi Islam di Iran 1979. Dimana perempuan Iran telah lama melakukan penolakan atau protes terhadap pihak berwenang Iran agar menghapuskan aturan yang bersifat mendiskriminasi bagi perempuan. Kemudian terdapat perbedaan antara penelitian keempat, kelima, keenam dengan penelitian utama penulis yaitu, penelitian utama penulis lebih berfokus pada studi kasus pasca kematian Mahsa Amini. Selain itu pada penelitian utama penulis lebih menyoroti pada strategi gerakan yang dilakukan untuk memprotes aturan hijab yang dianggap menyalahi hak kebebasan bagi perempuan Iran. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan terbaru untuk memperluas pemahaman dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Tesis	Jenis Penelitian: Deskriptif-Kualitatif	Upaya gerakan dilakukan melalui petisi, demonstrasi, dan sosial media. Salah satu

	<p>Upaya <i>Woman Life Freedom</i> Dalam Menegakkan Kebebasan Perempuan Di Iran (Studi Kasus Kematian Mahsa Amini</p> <p>Oleh: Iccha Anjelita Sijabat and Muhammad Yusuf Abror</p>	<p>Alat Analisa: Konsep gerakan sosial dengan 3 strategi utama yaitu tuntutan, ruang lingkup, dan taktik</p>	<p>taktik yang digunakan oleh gerakan ini adalah memotong rambut di tempat umum selama protes. Untuk mendapatkan dukungan global, gerakan ini aktif menggunakan media sosial dan hashtag #womanlifefreedom. Gerakan ini terus berlanjut dan berhasil menarik perhatian dunia terhadap keadaan di Iran. Terjadinya perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi gerakan ini terus berjuang untuk menegakkan kebebasan perempuan di Iran.</p>
2.	<p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Judul: <i>Juridical Study of the Death of Mahsa Amini Based on Islamic Law and International Human Rights</i></p> <p>Oleh: Renny Ayu Puspitasari, Pramesty Putri Ridzky Hutami, Mira Diva Prasyanti, Miskha Ainun Nisa, Fahriza Dhya Kusuma</p>	<p>Jenis Penelitian: Studi Literatur</p> <p>Alat Penelitian: Aturan perempuan Iran</p>	<p>Aturan kewajiban memakai hijab bersifat membatasi bagi Perempuan Iran. Iran memberi sanksi bagi siapa saja yang tidak menaati peraturan tersebut. Mahsa Amini adalah salah satu warga yang tertangkap, berujung pada kematiannya yang kemudian mengundang perhatian dunia bahkan dunia Internasional. Dunia banyak mengkritik bahwa aturan yang ditegakkan di Iran mengandung kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Iran sebagai negara yang bergabung dalam PBB seharusnya melindungi dan mensejahterakan warga negara dan juga memberikan hak bagi setiap warganya, namun pada prakteknya Iran jauh akan hal itu yaitu sebagai buktinya adalah kematian Mahsa Amini</p>
3.	<p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Mahsa Amini's Killing, State Violence, and</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif-analisis</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan hubungan antara empat elemen penting: radikalisme politik sebagai akibat dari eskalasi kekerasan di negara</p>

	<p>Moral Policing in Iran</p> <p>Oleh: Azam Khatam</p>	<p>Alat Penelitian: Pendekatan Studi Kasus</p>	<p>ini, peningkatan jumlah penentang aturan hijab, partisipasi pemuda dalam protes untuk kesempatan hidup yang lebih baik, dan kemarahan masyarakat anti-pemerintah atas tuntutan kebebasan. Gerakan protes anti-pemerintah di Iran menunjukkan aksi solidaritas dan ikatan kolektif yang kuat dalam menentang kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam menghadapi tekanan yang kuat dari pemerintah, gerakan protes ini menunjukkan keberanian masyarakat dan ketahanan mereka.</p>
4.	<p>Tesis</p> <p>Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi”</p> <p>Oleh: Moh. Choirul Anam</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif-analitis</p> <p>Alat Analisa: Peran perempuan Iran dan perspektif Shirin Ebadi</p>	<p>Kebijakan yang mengandung diskriminasi di Iran yang ditegakkan oleh Ayatullah Khomeini tidak dapat diubah meski oleh perempuan yang mendapat posisi strategis untuk merubah arah kebijakan. Tingginya patriarki juga membatasi akses bagi perempuan meski pendidikan mereka lebih tinggi dari laki-laki, pekerjaan hanya banyak diperoleh dari laki-laki, bahkan perempuan yang dicap sekuler disingkirkan. Shirin Ebadi, seorang feminis islam menyuarakan jika posisi perempuan Iran sangat dibatasi, dan terdapat ketimpangan gender di Iran. Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjunjung kesetaraan, Iran malah memberi batasan bagi perempuan.</p>

<p>5.</p>	<p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menentang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005</p> <p>Oleh: Samsi Azizah dan M. Zahrul Anam</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Alat Penelitian: Gerakan perempuan menghapus ketimpangan gender dengan teori advokasi</p>	<p>Dalam advokasinya perempuan di Iran telah melakukan gerakan untuk menghapus ketidakadilan gender setelah terjadinya revolusi. Pertama, melakukan studi literasi akan pentingnya kesetaraan gender. Kedua, menyuarakan kesetaraan gender melalui media informasi seperti jurnal, buku, dan majalah. Ketiga, melakukan <i>lobby</i> kebijakan dengan memposisikan perempuan di tempat yang strategis dalam pemerintahan.</p>
<p>6.</p>	<p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab Pada Era Hassan Rouhani</p> <p>Oleh: Nabilah Wafa W. dan Roma Ulinuha</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Alat Penelitian: Peraturan hijab Iran dan Resistensi Perempuan dengan perspektif Feminisme Fatima Mernissi.</p>	<p>Kebijakan wajib berhijab bagi perempuan yang di berlakukan di Iran sangat ditentang keras, dan puncak dari aksi para perempuan adalah di Era kepemimpinan Rouhani. Kampanye melalui media sosial dilakukan sebagai bentuk perlawanan perempuan terhadap kebijakan. Kampanye online ini dikenal dengan sebutan <i>My Stealthy Freedom</i>, dan kampanye ini telah mencuri perhatian dunia Internasional, sehingga mempengaruhi pola pikir perempuan di dunia. Hijab yang sebelumnya adalah persoalan agama, Iran memposisikannya sebagai ikon negara dan menjadi bagian alat untuk berpolitik.</p>

1.5. Konsep

Gerakan Sosial Baru

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) untuk membantu penulis dalam menjelaskan penelitian ini. Berangkat dari hal tersebut, diperlukannya pengetahuan terlebih dahulu untuk memahami definisi dasar dari Gerakan Sosial (*Social Movement*). Terdapat berbagai macam definisi gerakan sosial dikemukakan oleh beberapa tokoh. Menurut Macionis, gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk terjadinya perubahan dalam kehidupan yang baru. Berdasarkan definisi tersebut, Macionis menunjukkan dua ciri utama dari gerakan sosial yaitu terdapat aktivitas yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk perubahan sebuah tatanan sosial.²²

Sedangkan menurut Locher, gerakan sosial muncul dari sekelompok orang yang memiliki kuasa, baik itu sedikit atau banyak dalam politik untuk mengatur diri dalam upaya menolong atau mendorong terjadinya beberapa perubahan sosial. Sedikit atau banyaknya kekuatan politik yang bergabung menjadi satu untuk mendapatkan beberapa tujuan yang menuju perubahan sosial maka itu merupakan gerakan sosial. Disamping itu Stolley mengartikan gerakan sosial berdasarkan dari pendapat Tarrow, yaitu tindakan penentangan terhadap status quo, wewenang, dan budaya yang telah ada untuk mencapai tujuan tertentu. Klandermans mengutip juga pendapat dari Tarrow, ia

²² Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, hal. 4

menyatakan jika gerakan sosial merupakan bentuk penentangan atau perlawanan kolektif yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa solidaritas serta tujuan yang sama sebagai bentuk dari interaksi yang dilakukan.²³

Menurut pandangan Singh pemetaan teoritik Gerakan Sosial diklasifikasikan menjadi 3 macam; **Pertama**, Gerakan Sosial Klasik (*Classical*) berorientasi pada studi perilaku kolektif seperti kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*), dan juga kelompok pemberontakan (*rebel groups*) oleh para psikolog sosial Barat pada era sebelum tahun 1950-an. **Kedua**, Neo-Klasik (*neo-classical*) masih berkaitan dengan studi Gerakan Sosial lama (*Old Social Movement*). Neo-Klasik dibagi menjadi dua Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*) yaitu fungsional dan diskusi Marxis. Kontribusi dalam tradisi ini melibatkan sosiolog dari Barat dan juga dari India. **Ketiga**, Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) muncul dan berkembang di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Pembangunan *New Social Movement* dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan adanya gerakan dengan isu lingkungan, gerakan dengan isu perdamaian, feminisme, hak-hak bagi binatang, dan gerakan lainnya. Dimana Masyarakat Eropa dan Amerika pada saat itu tumbuh dengan banyaknya gerakan secara besar-besaran yang bergerak pada isu-isu humanis, kultural, dan non-materialistik.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hal 124-125.

Munculnya teori *New Social Movement* adalah bentuk kritikan terhadap teori *Old Social Movement* yang orientasinya hanya pada ideologi kelas dan isu terkait ekonomi. Sedangkan *New Social Movement* sifatnya plural atau universal dikarenakan bergerak pada isu-isu terkait rasisme, isu anti-nuklir, gencatan senjata, isu feminisme, isu lingkungan, isu regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil, serta isu kebebasan individu dan juga isu perdamaian. Perkembangan masyarakat modern (*modernist society*) hingga menjadi masyarakat pasca modernitas (*post modernist-post society*) menandai perubahan dari gerakan sosial lama (klasik dan neo-klasik) menjadi *New Social Movement*. *New Social Movement* memiliki tujuan dan nilai-nilai bersifat universal yang kemudian diarahkan untuk mencapai kondisi dimana kehidupan manusia menjadi lebih baik. Berbeda dari *Old Social Movement*, *New Social Movement* memiliki ideologi yang lebih universal yang tidak hanya berfokus pada ideologi seperti anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan pejuang kelas saja.²⁵

Terdapat ciri-ciri yang dipaparkan oleh Larana, Johnston, dan Gusfield terkait *New Social Movement*, yaitu: **Pertama**, melampaui struktur kelas (*class structure*), *New Social Movement* menyebar dalam berbagai status sosial yaitu dari pemuda, berbagai gender, orientasi seksual, kalangan profesional yang kemudian bergabung tanpa adanya penjelasan struktural. **Kedua**, pandangannya lebih plural, yaitu tidak berfokus pada pandangan marxis seperti *Old Social Movement*. Dimana sistemnya lebih terbuka untuk partisipan dalam mengambil sebuah keputusan. **Ketiga**, faktor mobilisasi tidak lagi dikaitkan

²⁵ *Ibid*, hal 124-125.

dengan keluhan ekonomi yang berhubungan dengan kelas pekerja, *New Social Movement* lebih mengarah pada isu simbolis dan kultural terkait identitas. Yaitu berangkat dari keyakinan (*beliefs*), simbol (*symbols*), nilai (*values*), dan makna (*meanings*). **Keempat**, individu dan ekonomi hubungannya tidak jelas (kabur). **Kelima**, menyangkut pada aspek dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku fisik dan seksual. **Keenam**, tidak melibatkan kekerasan dan pembangkangan sipil. *New Social Movement* memanfaatkan taktik mobilisasi yang berbeda dengan praktik mobilisasi gerakan kelas pekerja. **Ketujuh**, *New Social Movement* menunjukkan gaya kepemimpinan yang kolektif atau dengan kata lain bersifat desentralisasi, segmental. Gaya kepemimpinan yang kolektif ini memiliki arti bahwa gaya kepemimpinannya menyebar dan melibatkan semua orang sebagai pemimpin dalam berjalannya sebuah gerakan sosial.²⁶

Dalam gerakan sosial terdapat suatu strategi untuk meningkatkan calon partisipan, yang memiliki tujuan untuk memperluas pengaruh dari gerakan tersebut. Strategi tersebut adalah **Strategi Recruitment**. Menurut David Snow, Louis dan Sheldon, strategi *recruitment* pada umumnya dilaksanakan dengan pendekatan *social-psychological* atau analisis pada pendekatan emosional. Pendekatan berupa ajakan atau persuasif yang menarik minat para calon partisipan, yang dilakukan dengan menyediakan informasi dan fakta mengenai gerakan terhadap calon partisipan. *Recruitment* terjadi dengan kontak langsung antara calon partisipan dengan agen *recruitment*. Partisipasi potensial harus

²⁶ *Ibid*, hal 126-127.

mengalami pengenalan terhadap informasi gerakan untuk menentukan minat mereka seterusnya kepada gerakan. Sehingga calon partisipan dalam suatu gerakan dapat memutuskan keterikatan mereka terhadap gerakan tersebut. Calon partisipan dapat memutuskan akan ikut serta dalam suatu gerakan atau tidak apabila sudah memiliki kesadaran mengenai gerakan tersebut. Masuknya calon partisipan ke dalam suatu gerakan didasarkan pada dua cara. Pertama, melalui aksi langsung, dan kedua, adalah dengan aksi tidak langsung melalui berbagai media komunikasi yang mampu menyampaikan informasi kepada calon partisipan.²⁷

Adapun strategi yang digunakan untuk penyebaran informasi dalam suatu gerakan ataupun aksi dilaksanakan dengan dua cara, yaitu **Public** dan **Private**. **Public** dilaksanakan secara langsung dengan melakukan penyebaran brosur ataupun petisi dengan ajakan langsung untuk aksi demonstrasi ke jalan-jalan. Dapat juga dilaksanakan melalui media-media yang dapat digunakan adalah media sosial, televisi, dan radio. Sedangkan komunikasi **Private** penyebaran informasi dilaksanakan melalui mekanisme komunikasi massa yang dapat diindividualisasikan dan bersifat privasi yaitu melalui surat dan telepon. Adapun penyebaran informasi dikonseptualisasikan secara umum berdasarkan tatap muka atau melalui media. Yaitu dapat dijelaskan seperti:

1. **Aksi Langsung (Face to Face):** Komunikasi tatap muka mencakup semua informasi verbal dan non-verbal yang disampaikan dengan

²⁷ David A. Snow, Jr. Louis A. Zurcher, and Sheldon Ekland-Olson, *Social Network and Social Movements; A Microstructural Approach to Differential Recruitment*, vol. 16 (American Sociological Association, 1980).

kehadiran secara fisik kepada dua individu atau kelompok. Tatap muka dipetakan menjadi dua, diantaranya; **Pertama**, *Private Face to Face* yang merupakan pertemuan antara dua pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai tokoh yang mempengaruhi dan pihak lainnya yang diberikan pengaruh. Penyebarannya dilaksanakan dengan jaringan interpersonal seperti seminar/dakwah pribadi, penyebaran selebaran dengan metode *door-to-door*. **Kedua**, *Public Face to Face* merupakan pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang sebagai pihak yang diberikan pengaruh. Penyebaran informasi *Public Face to Face* dilaksanakan dengan penyebaran selebaran secara langsung, membuat petisi, partisipasi dalam acara publik, aksi demonstrasi, konvensi, gerakan yang disponsori, dan festival.

2. **Aksi Tidak Langsung (melalui media):** Aksi tidak langsung dilakukan dengan komunikasi media melalui perantara yang mengacu pada penyebaran informasi dengan jangkauan luas seperti komunikasi massa. Komunikasi Media dibagi menjadi dua, diantaranya; **Pertama**, *Private Mediated* merupakan proses rekrutmen yang dilaksanakan secara pribadi menggunakan media atau perantara. Penyebaran informasinya dilaksanakan dengan promosi dan rekrutmen melalui surat dan telepon. **Kedua**, *Public Mediated* merupakan proses rekrutmen yang dilaksanakan melalui media komunikasi dengan jangkauan luas. Penyebaran informasi dalam *Public Mediated* dilaksanakan dengan

promosi dan rekrutmen melalui radio, televisi, dan penggunaan media sosial.²⁸

Jaringan informasi dan komunikasi merupakan sumber paling krusial dalam perekrutan anggota gerakan sehingga produktivitas perekrutan di ruang publik tidak lagi berdasarkan pada jaringan keluarga ataupun orang asing yang tidak dikenal, melainkan melalui jaringan komunikasi yang baik. Jaringan komunikasi yang baik memainkan peran utama dalam perekrutan anggota aktif. Namun, simpatisan dari luar jaringan juga dapat direkrut, bergantung pada daya tarik tujuan gerakan tersebut.

Berdasarkan strategi tersebut, gerakan sosial ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya sebuah strategi dalam gerakan sosial, akan membantu berjalannya gerakan sosial sesuai dengan tujuannya yaitu mencapai perubahan sosial yang dituju. Sesuai dengan konsep *New Social Movement*, dengan adanya strategi tersebut berupaya untuk meningkatkan calon partisipan, yang memiliki tujuan untuk memperluas pengaruh gerakan ini. Di era digital seperti saat ini contohnya, untuk mendapatkan perhatian publik menjadi hal mudah untuk dicapai, bahkan gerakan sosial dapat tersebar ke penjuru dunia. Berdasarkan hal tersebut, strategi *recruitment* dapat membantu dalam memahami bagaimana gerakan *Woman Life Freedom* dalam memobilisasi dan mempengaruhi publik hingga mendapat dukungan. Dengan begitu diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan strategi *Woman Life Freedom* dalam

²⁸ *Ibid.*

memperjuangkan keadilan aturan hijab Iran setelah peristiwa kematian Mahsa Amini.

Sesuai dengan konsep tersebut, gerakan *Women Life Freedom* masuk dalam klasifikasi gerakan sosial baru berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Gerakan *Woman Life Freedom* partisipannya melampaui struktur kelas yaitu melibatkan perempuan dan laki-laki dari berbagai usia, latar belakang, dan juga status sosial. Selain itu gerakan ini tidak fokus pada isu ekonomi dan kelas pekerja, namun lebih pada isu plural yaitu salah satunya isu identitas seperti gerakan ini. Dalam pengambilan keputusan dalam gerakan *Woman Life Freedom* juga bersifat terbuka, karena menganut gaya kepemimpinan yang kolektif. Oleh karena kematian mahsa amini inilah, kemudian membuat eksistensi dari gerakan *Woman Life Freedom* tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap aturan wajib hijab di Iran, namun sekarang ini telah menjadi simbol dari perubahan sosial yang sedang berlangsung di mata masyarakat dunia. Dimana hal ini sejalan dengan konsep gerakan sosial baru yang memiliki tujuan dan nilai-nilai dengan bersifat universal yang kemudian diarahkan untuk mencapai kondisi dimana kehidupan manusia menjadi lebih baik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh gerakan *Woman Life Freedom* dalam memperjuangkan keadilan aturan hijab Iran setelah terjadinya

peristiwa kematian Mahsa Amini. Yaitu penulis berusaha menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan peristiwa tersebut secara sistematis dan rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada.

1.6.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penulis berusaha untuk menggambarkan persoalan dan mengolah fenomena atau peristiwa yang terjadi berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu sebagai sumber untuk menjawab rumusan masalah, membuat kesimpulan, dan menyelesaikan penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka atau teknik *library research*. Yaitu penulis berusaha untuk memanfaatkan data-data yang sudah penulis kumpulkan dari jurnal, skripsi, buku, berita, *working paper*, dan sumber lainnya.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu luas, maka diperlukan adanya batasan materi. Yaitu penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana perjuangan gerakan *Woman Life Freedom* berusaha untuk memperjuangkan keadilan aturan hijab di Iran, dan instrumen munculnya gerakan *Woman Life Freedom* dalam penelitian

ini adalah peristiwa kematian Mahsa Amini yang sebelumnya melanggar aturan berhijab di Iran sehingga dirinya ditangkap dan berakhir meninggal dunia.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu dari awal mula peristiwa kematian Mahsa Amini yang terjadi pada september 2022 sehingga terbentuk gerakan *Woman Life Freedom* untuk menyuarkan keadilan baginya ditambah dengan informasi terbaru dari 2022-2024 sekarang ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan referensi yang ada 10 tahun terakhir sebagai sumber penelitian.

1.7. Argumen Pokok

Aturan kewajiban berhijab di Iran merupakan aturan yang sangat kontroversial dari dulu hingga saat ini. Hal ini dikarenakan aturan tersebut mengandung pemaksaan dan diskriminasi. Hukuman keras diberlakukan bagi perempuan-perempuan Iran yang didapati tidak mengenakan hijab pada ruang publik. Mahsa Amini merupakan salah satu warga Iran yang ditangkap oleh polisi moral karena telah melanggar aturan. Namun beberapa waktu setelah dirinya ditangkap, Mahsa Amini diberitakan telah meninggal dunia. Meninggalnya Mahsa Amini dipercaya akibat dari kekerasan yang didapati saat dirinya ditahan oleh polisi moral.

Berita kematian Mahsa Amini menjadi instrumen dari pecahnya gerakan *Woman Life Freedom*. Masyarakat menyuarkan penolakan mereka terhadap kebijakan yang dianggap mendiskriminasi dan juga untuk menuntut keadilan bagi

Mahsa Amini. Gerakan *Woman Life Freedom* hadir untuk memperjuangkan kesetaraan serta kehidupan yang bebas bagi perempuan. Gerakan ini menggunakan strategi *recruitment* untuk menjelaskan perjuangan mencapai keadilan bagi perempuan mengenai aturan hijab di Iran. Berdasarkan pada strategi *recruitment* tersebut, dilakukan beberapa cara untuk mengusahakan berjalannya gerakan *Woman Life Freedom* sebagai aksi untuk menuntut hak kebebasan bagi perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri. Aksi-aksi dari gerakan *Woman Life Freedom* dilakukan dengan melalui cara langsung dan secara tidak langsung. Namun nyatanya respon yang dilakukan oleh pemerintahan Iran terhadap aksi dari gerakan ini, belum dapat membebaskan perempuan dari kekangan dan kekerasan yang dibuat oleh pemerintah Iran.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang dapat dipahami melalui uraian singkat sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual
--------------	---

	<p>1.5.1 Gerakan Sosial Baru</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis data</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	<p>KEBIJAKAN HIJAB DI NEGARA IRAN DAN GERAKAN <i>WOMAN LIFE FREEDOM</i></p> <p>2.1 Kebijakan Hukum Hijab</p> <p>2.1.1 Hijab sebelum Revolusi Islam Iran</p> <p>2.1.2 Hijab sesudah Revolusi Islam Iran</p> <p>2.1.3 Pro-Kontra Masyarakat terhadap Aturan Hijab</p> <p>2.2 Gerakan <i>Woman Life Freedom</i></p> <p>2.2.1 Sejarah Gerakan <i>Woman Life Freedom</i></p> <p>2.2.2 Gerakan <i>Woman Life Freedom</i> pasca kematian Mahsa Amini</p>
BAB III	<p>STRATEGI GERAKAN <i>WOMAN LIFE FREEDOM</i> PASCA KEMATIAN MAHSA AMINI</p> <p>3.1. Demonstrasi Hingga Pameran Seni</p> <p>3.2. <i>Social Media</i>, Publik Figur, dan Generasi Muda</p>

	3.3. Tanggapan Organisasi Internasional dan Aktivistis HAM terhadap Gerakan <i>Woman Life Freedom</i>
BAB IV	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

